

PORTOFOLIO AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Kelompok 6:

1. Syifa Hesti Pratiwi 2313031003
 2. Irfan A Suki 2313031013
-

ARTIKEL

“Pengelolaan Anggaran Sektor Pendidikan Harus Lebih Terpadu”

Link: <https://mediaindonesia.com/humaniora/711261/pengelolaan-anggaran-sektor-pendidikan-harus-lebih-terpadu>

Analisis: Artikel ini membahas perlunya pemerintah memperbaiki tata kelola anggaran sektor pendidikan melalui integrasi sistem, transparansi, dan peningkatan perencanaan. Dalam artikel dijelaskan bahwa anggaran pendidikan seringkali tidak terserap optimal karena data kebutuhan sekolah tidak terhubung dengan baik ke sistem perencanaan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kebutuhan riil di lapangan.

Artikel juga menyoroti bahwa proses penganggaran pendidikan masih terfragmentasi antar lembaga, sehingga menyebabkan duplikasi program, lambatnya penyaluran dana, dan lemahnya monitoring pelaksanaan anggaran. Karena itu, dibutuhkan peningkatan keterpaduan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan agar anggaran pendidikan lebih efektif digunakan dan tepat sasaran. Selain itu, artikel menekankan bahwa perbaikan tata kelola harus diikuti dengan integrasi sistem informasi keuangan yang mampu menyediakan data akurat dan real-time, sehingga memudahkan proses evaluasi dan mempercepat realisasi anggaran. Transparansi dalam pelaporan juga menjadi hal penting agar penggunaan dana dapat diawasi dengan jelas dan mendorong akuntabilitas publik. Pada akhirnya, artikel ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi oleh bagaimana anggaran tersebut direncanakan, dikelola, dan diawasi secara terpadu sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu layanan pendidikan.

“Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Dorong Kompetensi Aparatur dalam Kelola Aset dan Pajak Daerah”

Link: <https://www.antaranews.com/berita/4712901/bpsdm-perkuat-kompetensi-aparatur-kelola-aset-dan-pajak-daerah>

Analisis: Artikel ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan aset dan pajak daerah agar tata kelola keuangan publik berjalan lebih efektif. Penguatan SDM ini bertujuan agar pencatatan aset menjadi lebih akurat, administrasi tertata rapi, dan pelaksanaan pajak daerah berjalan optimal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Aparatur yang kompeten juga mampu memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset publik, mendukung validitas laporan keuangan yang dapat diaudit, serta memperkuat pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan atau pemborosan anggaran. Selain itu, peningkatan kemampuan aparatur membantu pengambilan keputusan manajemen keuangan publik yang berbasis data, mempercepat realisasi program pembangunan, dan meningkatkan kualitas layanan publik.

“Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah melalui SIMDA BMD”

Link: <https://www.tempo.co>

Analisis: Artikel ini mengulas bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan aset melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Penggunaan SIMDA BMD dinilai mampu meningkatkan ketertiban administrasi aset, memperkuat akurasi pencatatan, serta mempermudah proses inventarisasi dan audit aset daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan kompetensi SDM pengelola sistem serta belum sepenuhnya terintegrasinya data aset lama ke dalam sistem. Meski demikian, artikel menegaskan bahwa penggunaan SIMDA BMD berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah, termasuk mendukung perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK karena penyajian data aset menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

JURNAL

“Analisis Value for Money dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Pelayanan Publik”

Link: <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2866>

Analisis: Jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan konsep value for money yang terdiri dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas telah mampu meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Dari sisi ekonomi, dinas mampu merealisasikan anggaran di bawah pagu sehingga penggunaan dana lebih hemat. Efisiensi juga tercapai karena sebagian besar program terealisasi sesuai target dengan penggunaan input yang rendah. Efektivitas terlihat dari keberhasilan mencapai outcome seperti peningkatan wisatawan, retribusi daerah, serta capaian program kesenian. Selain itu, akuntabilitas organisasi terwujud melalui kepatuhan pada SAP, penyusunan LAKIP tepat waktu, analisis program berkelanjutan, dan pemberian pelayanan publik yang dinilai memenuhi prinsip kejelasan, kesederhanaan, responsivitas, serta kesetaraan.

“Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya”

Link: <https://www.jurnal.bimaberilmu.com/index.php/jppi/article/view/757/506>

Analisis: Jurnal ini menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik sangat menentukan keberhasilan lembaga pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas anggaran dapat tercapai apabila alokasi dana dilakukan tepat sasaran, terutama untuk kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Namun, jurnal juga menemukan berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas pengelola keuangan, minimnya transparansi, serta lemahnya sistem pelaporan dan pengawasan, yang menyebabkan penggunaan dana kurang optimal. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas, pemanfaatan sistem informasi keuangan, serta penguatan kompetensi pengelola dianggap penting untuk memastikan dana pendidikan dikelola secara efisien, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi mutu pendidikan.

“Peran E-Governance sebagai Instrumen Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan di Indonesia”

Link: <https://journal.poltekim.ac.id/jaid/article/view/731>

Analisis: Jurnal ini menunjukkan bahwa e-governance berperan penting sebagai instrumen peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Indonesia melalui digitalisasi layanan publik dan penguatan akses informasi. Melalui studi literatur dan beberapa studi kasus seperti implementasi SPBE di Ciamis, Bandung, dan Jakarta penelitian ini membuktikan bahwa inovasi digital seperti aplikasi “Helo Ciamis”, platform “JAKI”, dan program “Open Data Jakarta” mampu membuka akses informasi secara lebih luas, mempercepat layanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Namun, jurnal ini juga menegaskan bahwa efektivitas e-governance masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta resistensi perubahan dari aparatur birokrasi. Dengan demikian, keberhasilan e-governance memerlukan dukungan regulasi yang kuat, penguatan kapasitas SDM, dan kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat.

“Impact of digital public services on governance efficiency”

Link:

<https://www.researchgate.net/publication/377501333> IMPACT OF DIGITAL PUBLIC SERVICES ON GOVERNANCE EFFICIENCY

Analisis: Jurnal ini menganalisis secara kuantitatif bagaimana perkembangan e-government dan layanan elektronik bagi warga berdampak pada efisiensi administrasi publik di berbagai negara. Melalui pendekatan statistik seperti korelasi, analisis faktor, regresi multivariat, dan metode radar, penelitian ini menemukan bahwa tingkat kemajuan layanan elektronik—diukur menggunakan E-Government Index—memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai indikator efektivitas pemerintahan, termasuk kualitas hidup, kepuasan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, efektivitas penegakan hukum, kemudahan berbisnis, persepsi korupsi, inovasi, dan daya saing nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa e-government dapat menjelaskan sekitar 57% variasi dalam indikator efisiensi administrasi publik, meskipun penulis mengingatkan adanya standar error yang cukup besar sehingga interpretasi harus berhati-hati. Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik bukan hanya menyederhanakan prosedur birokrasi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme strategis yang meningkatkan interaksi warga dengan pemerintah dan memperkuat kualitas tata kelola secara menyeluruh.

“A Systematic Review of the Role of Public Sector Accounting Practices on Accountability and Transparency”

Link: **<https://ojs.sticamkop.ac.id/index.php/amar/article/view/1440/1029>**

Analisis: Jurnal ini menganalisis secara sistematis bagaimana praktik akuntansi sektor publik berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Berdasarkan rangkuman penelitian sebelumnya, jurnal ini menegaskan bahwa penerapan standar akuntansi internasional, audit yang kuat, serta sistem pelaporan yang baik merupakan faktor kunci untuk mencegah mismanajemen, kecurangan, dan ketidakjelasan informasi keuangan. Hasil review menunjukkan bahwa digitalisasi, e-government, dan keterbukaan akses informasi dapat memperbaiki transparansi, tetapi masih dihadapkan pada tantangan seperti keamanan data, literasi digital, dan kompleksitas birokrasi. Selain itu, jurnal ini menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM, etika, dan pengawasan internal sangat penting untuk menciptakan budaya akuntabilitas yang konsisten. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan multifaset menggabungkan standar akuntansi modern, teknologi, penguatan etika, dan pengawasan untuk mencapai tata kelola keuangan publik yang transparan, efektif, dan terpercaya.

LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk 2024

Analisis: Laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk per 31 Maret 2024 menunjukkan kondisi keuangan yang membaik dibanding periode sebelumnya. Total aset perusahaan mencapai Rp25,92 triliun, naik dari Rp23,87 triliun pada Desember 2023, didorong oleh peningkatan aset lancar dari Rp14,74 triliun menjadi Rp16,19 triliun. Penjualan dan pendapatan usaha mencapai Rp8,76 triliun, dengan laba bersih Rp1,13 triliun, meningkat signifikan dari Rp737 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Kas dan setara kas juga mengalami kenaikan dari Rp4,16 triliun menjadi Rp4,81 triliun, menunjukkan likuiditas yang memadai. Secara umum, struktur keuangan Mayora tetap kuat dengan total liabilitas Rp9,5 triliun dan ekuitas Rp16,42 triliun, menunjukkan fundamental yang sehat dan kinerja operasional yang positif di kuartal I 2024. Aset tetap perusahaan mencapai Rp8,65 triliun, dan piutang usaha pihak ketiga serta pihak berelasi masing-masing sebesar Rp415 miliar dan Rp6,53 triliun, menunjukkan peningkatan dalam aktivitas penjualan dan hubungan dengan mitra bisnis. Laba per saham dasar tercatat Rp50, lebih tinggi dari Rp33 pada periode sebelumnya, menunjukkan peningkatan efisiensi dan profitabilitas perusahaan dalam tiga bulan pertama 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Krasnykov, Y., Ninyuk, I., Storozhenko, L., Marukhlenko, O., & Kruhlov, V. (2024). *Impact of digital public services on governance efficiency*. TELOS: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 26(1), 35–51.
- PT Mayora Indah Tbk. (2024). Laporan Keuangan Kuartal I 2024. Diakses dari <https://www.mayoraindah.co.id/content/Laporan-Keuangan-Kuartal-89>
- Puspa, A. (2024, October 22). *Pengelolaan anggaran sektor pendidikan harus lebih terpadu*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/711261/pengelolaan-anggaran-sektor-pendidikan-harus-lebih-terpadu>
- Putra, I. H., Ismanto, S. U., & Runiawati, N. (2022). *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung*. Jurnal Administrasi Negara, 14(1), 238–255.
- Sari, R., & Muslim, M. (2023). *Accountability and transparency in public sector accounting: A systematic review*. Amkop Management Accounting Review (AMAR), 3(2), 90–106.
- Shabihah, S. A., Ryanindityo, M., & Nurkumalawati, I. (2025). *Peran e-governance sebagai instrumen peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia*. JAID: Journal of Administration and International Development, 5(1), 45–57.
- Sinambela, N. M. (2025, March 15). *BPSDM perkuat kompetensi aparatur kelola aset dan pajak daerah*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4712901/bpsdm-perkuat-kompetensi-aparatur-kelola-aset-dan-pajak-daerah>
- Trilaksono, B. A., & Handayani, N. (2020). Analisis value for money dan akuntabilitas dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–15.
- Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan keuangan pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1723–1732.